

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DENGAN AMERIKA SERIKAT

Bab ini akan membahas mengenai dinamika hubungan politik luar negeri Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Penulis akan membahas mengenai Dinamika Politik Arab Saudi, Dinamika Politik Amerika Serikat, Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi dan Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Arab Saudi.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dinamika hubungan politik luar negeri Arab Saudi dengan Amerika Serikat, penulis akan menunjukkan peta geopolitik antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat.

Gambar 1. Peta Geopolitik Arab Saudi – Amerika Serikat¹⁵



Pada peta menunjukkan wilayah Arab Saudi dan wilayah Amerika Serikat dalam satu lapang pandang guna memberikan gambaran dimana letak keduanya dan bagaimana jarak geopolitik antar kedua wilayah tersebut.

¹⁵ Arab Saudi – Amerika Serikat,
<http://id.pinterest.com/pin/433471532864880278/> diakses 6/05/18
pukul 15:22

A. Dinamika Politik Arab Saudi

Gambar 2. Peta Arab Saudi¹⁶



Arab Saudi adalah negara berpenduduk mayoritas muslim yang terletak di semenanjung arab dengan bentuk pemerintahan monarki absolut. Arab Saudi terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT, berbatasan dengan Yordania dan Irak di utara, Kuwait di timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di timur, Oman di tenggara, dan Yaman di selatan. Luas kawasannya adalah 2.240.000 km².¹⁷ Wilayah Arab Saudi merangkumi empat perlima kawasan di Semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki "Daerah Kosong" (dalam bahasa Arab, *Rub al Khali*), kawasan gurun terluas di dunia. Namun di bagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau.

Terhadap sistem politiknya, Arab Saudi menggunakan sistem monarki absolut. Undang-Undang Dasar Arab Saudi

¹⁶ http://www.mapnall.com/id/Peta-Arab-Saudi_34088.html diakses 15/04/18 pukul 20:00

¹⁷ http://www.saudiembassy.net/about/country-information/facts_and_figures, diakses 25/12/17 pukul 20:00

diadopsi dari dekrit Raja pada tahun 1992, dimana Raja harus tunduk kepada hukum Syariat dan Quran, sedangkan Quran dan Sunnah diposisikan sebagai konstitusi negara. Sistem politik Arab Saudi tidak mengenal partai politik atau pemilihan umum nasional. Kondisi ini memunculkan banyak kritik yang menganggapnya sebagai kediktatoran totaliter. The Economist menempatkan pemerintah Saudi pada urutan kelima negara yang paling otoriter dari 167 negara yang dinilai pada 2012, sementara itu Freedom House memberikan rating terendah "Tidak Bebas", 7.0 (1= terbaik, 7 = terburuk") pada 2013. Dengan tidak adanya pemilu nasional dan partai politik, politik di Arab Saudi berlangsung di dua arena yang berbeda: di internal keluarga kerajaan, keluarga Al-Saud, dan antara keluarga kerajaan dengan sisanya dari masyarakat secara luas. Di luar keluarga Al-Saud, partisipasi dalam proses politik sangat terbatas pada segmen yang relatif kecil.

Dalam sistem pemerintahan Arab Saudi, Raja merupakan pemegang otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekaligus. Raja juga merangkap sebagai perdana menteri, dan memimpin Dewan Menteri (Majlis al-Wuzarā'), yang terdiri dari wakil perdana menteri dan menteri-menteri lainnya. Konstitusinya adalah Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1992 ditetapkan *Basic Law of Government* yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Sedangkan hukumnya, berdasarkan hukum Islam (Syariah) yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Keluarga kerajaan mendominasi sistem politik. Sejumlah besar keluarga memungkinkan untuk mengontrol sebagian besar posisi penting di kerajaan dan memiliki peran dan kewenangan di semua tingkat pemerintahan. Jumlah pangeran diperkirakan sedikitnya 7.000, dengan kekuasaan dan pengaruh yang paling sebanyak 200 orang keturunan laki-laki dari Ibnu Saud. Kementerian-kementerian strategis umumnya disediakan untuk keluarga kerajaan, sebagaimana posisi gubernur di tiga belas daerah yang strategis.

Keluarga kerajaan secara politis dapat dibagi kedalam beberapa faksi berdasarkan klan, ambisi pribadi dan perbedaan ideologi. Faksi klan yang paling kuat dikenal sebagai 'Sudairi Seven', yang terdiri dari almarhum Raja Fahd dan saudara kandung serta keturunan mereka. Pada sisi ideologis mencakup perbedaan sikap dalam memandang isu-isu seputar reformasi, dan apakah peran ulama harus ditingkatkan atau dikurangi.

Dalam indeks persepsi korupsi internasional yang dikeluarkan pada tahun 2010, Arab Saudi mendapatkan skor 4,7 (pada skala dari 0 sampai 10 di mana 0 adalah "sangat korup" dan 10 adalah "sangat bersih"). Arab Saudi telah mengalami proses reformasi politik dan sosial, seperti untuk meningkatkan transparansi publik dan tata pemerintahan yang baik.¹⁸ Namun, nepotisme dan patronase masih tinggi di negara tersebut. Selain itu, penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi juga masih tebang pilih.

Telah ada tekanan untuk mereformasi dan memodernisasi aturan keluarga kerajaan, agenda yang diperjuangkan oleh Raja Abdullah. Penciptaan Dewan Konsultatif di awal 1990-an tidak memenuhi tuntutan partisipasi politik, dan di 2003, Forum Dialog nasional tahunan diumumkan bahwa akan memungkinkan para profesional dan intelektual yang dipilih untuk debat publik isu-isu nasional saat ini. Pada tahun 2005, pemilu kota pertama diadakan. Pada tahun 2007, Dewan Kesetiaan diciptakan untuk mengatur suksesi. Pada tahun 2009, raja membuat perubahan personel yang signifikan kepada pemerintah dengan menunjuk mereka yang dianggap reformis untuk menduduki posisi kunci dan menunjuk perempuan sebagai menteri untuk pertama kalinya. Namun, perubahan telah dikritik karena terlalu lambat atau hanya pencitraan.

¹⁸ Library of Congress, Federal Research Division (2006). "*Country Profile: Saudi Arabia*". Dalam http://memory.loc.gov/frd/cs/profiles/Saudi_Arabia.pdf, diakses 2/12/2017 pukul 22:13

Dalam sistem politik dan pemerintahan Saudi, ulama memiliki posisi dan peran strategis dalam sistem politik kerajaan Saudi. Para ulama memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, misalnya pengenaan embargo minyak pada tahun 1973 dan undangan untuk pasukan asing ke Arab Saudi pada tahun 1990. Selain itu, mereka memiliki peran utama dalam sistem peradilan dan pendidikan dan monopoli kekuasaan di bidang moral keagamaan dan sosial.

Secara historis, posisi sentral ini berpangkal dari Syeikh Al-Ash, seorang ulama terkemuka di negara itu. Al-ash adalah keturunan dari Muhammad ibn Abd al-Wahhab, pendiri gerakan Wahhabi, salah satu aliran dalam faham Sunni yang sekarang dominan di Arab Saudi. Keluarga Ibn Wahhab adalah keluarga terkemuka di Saudi di luar keluarga Al-Saud (keluarga kerajaan). Dua kekuatan ini kemudian membentuk kesepakatan untuk saling mendukung. Kesepakatan inilah yang mengawali pertalian antara Kerajaan Saudi dengan Wahhabi, kesepakatan yang berlanjut sampai hari ini.

B. Dinamika Politik Amerika Serikat

Gambar 3. Peta Amerika Serikat¹⁹



¹⁹ <https://id.maps-usa.com/serikat-geografi-peta> diakses 15/04/18 pukul 20:40

Amerika Serikat terbentuk pada tahun 1787 dan terdiri dari 50 negara bagian. Amerika Serikat adalah sebuah negara Republik Konstitusional Federal yang terletak di Benua Amerika Utara. Negara yang biasanya disebut dengan *United States of America* atau USA dalam bahasa Inggris ini memiliki luas wilayah sebesar 9.833.517 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 323.995.528 jiwa. Luas Wilayah yang besar dan Jumlah penduduk yang banyak tersebut menjadikan Amerika Serikat sebagai negara terbesar ketiga di dunia dan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia.

Amerika Serikat merupakan negara yang berbentuk Federal, Amerika Serikat memiliki 50 Negara Bagian dan 1 wilayah Distrik. Setiap Negara Bagian dipimpin oleh Gubernur yang menjabat sebagai Kepala Negara Bagian dan Kepala Pemerintahan Negara Bagian.

Secara Geografis, Amerika Serikat berbatasan darat dengan Kanada di sebelah utaranya dan Meksiko di sebelah selatannya. Sedangkan di sebelah Timur adalah Samudera Atlantik dan sebelah baratnya adalah Samudera Pasifik. Terdapat dua negara bagian yang letaknya terpisah dengan daratan Amerika Serikat yaitu negara bagian Alaska yang terletak di sebelah ujung laut benua Amerika Utara dan berada sangat dekat dengan bagian barat Rusia. Jarak Alaska dan Rusia yang terdekat adalah 82 km dan dipisahkan oleh selat Bering. Sedangkan negara bagian Hawaii berada di Samudera Pasifik. Ibukota Amerika Serikat adalah Washington, DC.

Luas wilayah daratan utama Amerika Serikat adalah 2.959.064 square miles (7.663.941 km²). Alaska, yang dipisahkan dari daratan utama Amerika Serikat oleh Kanada, adalah negara bagian terluas, dengan luas 663.268 square miles (1.717.856 km²). Hawaii berlokasi di tengah-tengah Samudra Pasifik, di sebelah barat daya Amerika Utara, dengan luas wilayah 10.931 square miles (28.311 km²).²⁰

²⁰ Lubowski, ruben, Vesterby, Marlow, Bucholtz, shawn (21 juli 2006). Land Use. Economic Research Service, diakses 28/11/17 pukul 16:22

Amerika Serikat adalah negara terluas ketiga atau keempat di dunia (menurut luas daratan dan perairan), di bawah Rusia dan Kanada serta satu tingkat di atas atau di bawah RRC. Pemingkatan tersebut bervariasi, tergantung pada apakah wilayah-wilayah yang dipersengketakan oleh RRC dan India turut dihitung dan bagaimana pengukuran luas total dari Amerika Serikat sendiri: kisaran perhitungan mulai dari 3.676.486 square miles (9.522.055 km²) hingga 3.717.813 square miles (9.629.091 km²) dan 3.794.101 square miles (9.826.676 km²). Jika yang dihitung hanya luas daratan saja, maka Amerika Serikat menempati peringkat ketiga, di bawah Rusia dan RRC serta di atas Kanada.²¹

Dataran di sebelah pesisir Atlantik terdiri dari hutan gugur dan perbukitan Piedmont. Pegunungan Appalachian membagi pantai timur Amerika Serikat menjadi dua bagian, yaitu kawasan Danau-Danau Besar dan padang rumput Midwest. Sungai Mississippi–Missouri, yang merupakan sistem sungai terpanjang keempat di dunia, mengalir dari utara ke selatan melalui jantung Amerika Serikat. Di sebelah barat, membentang padang rumput Great Plains yang subur dan datar, dan diujungnya terdapat dataran tinggi di sebelah tenggara.

Pegunungan Rocky terletak di tepi barat Great Plains, membentang dari utara ke selatan di seluruh negara, dengan ketinggian lebih dari 14.000 kaki (4.300 m) di Colorado. Di sebelah baratnya lagi, terdapat Great Basin dan padang gurun seperti Chihuahua dan Mojave. Pegunungan Sierra Nevada dan Cascade terletak di sepanjang pesisir Pasifik, keduanya memiliki tinggi lebih dari 14.000 kaki.

Titik terendah dan tertinggi di Amerika Serikat daratan berada di negara bagian California, keduanya hanya berjarak 80 mil. Dengan ketinggian 20.320 kaki (6.194 m), Gunung McKinley di Alaska adalah puncak tertinggi di Amerika Serikat dan di Amerika Utara. Gunung api aktif

²¹ “United states”. Encyclopedia Britannica, diakses 20/02/18 pukul 09:15

umumnya terdapat di Alaska, misalnya di Kepulauan Alexander dan Aleutian. Hawaii juga memiliki banyak gunung berapi aktif. Supervulkan yang mendasari terbentuknya Taman Nasional Yellowstone adalah situs vulkanis terbesar yang terdapat di Amerika Serikat.²²

Dengan luasnya yang besar dan keadaan geografis yang beragam, Amerika Serikat juga memiliki berbagai tipe iklim. Di sebelah timur meridian ke-100, iklimnya berkisar antara kontinental lembap di sebelah utara hingga subtropis lembap di sebelah selatan. Ujung selatan Florida beriklim tropis, begitu juga di Hawaii. Great Plains di sebelah barat meridian ke-100 beriklim semi-kering. Sedangkan sebagian besar pegunungan di bagian Barat beriklim alpen. Di Great Basin iklimnya kering, barat daya beriklim gurun, sementara pesisir California beriklim Mediterania, dan iklim laut terdapat di Oregon, Washington, dan Alaska selatan. Sebagian besar Alaska beriklim subartik atau kutub. Cuaca ekstrem sering terjadi di negara-negara bagian yang berbatasan dengan Teluk Meksiko yang rentan terhadap badai; sebagian besar tornado di dunia terjadi di Amerika Serikat, terutama di Tornado Alley, Midwest.

Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang memiliki *megakeragaman* ekologi; sekitar 17.000 spesies tumbuhan berpembuluh tumbuh di daratan utama Amerika Serikat dan Alaska. Selain itu, lebih dari 1.800 tumbuhan berbunga ditemukan di Hawaii, beberapa di antaranya juga tumbuh di AS daratan. Amerika Serikat juga menjadi kediaman bagi lebih dari 400 mamalia, 750 burung, 500 reptil dan spesies amfibi. Kurang lebih 91.000 spesies serangga juga hidup di Amerika Serikat.²³

Undang-Undang Pelestarian Spesies 1973 disahkan untuk melindungi spesies-spesies yang habitatnya terancam

²² Larry O'Hanlon, *Supervolcano: What's Under Yellowstone?*, Discovery Channel, diakses 26/12/17 pukul 15:00

²³ Global Significance of Selected U.S. Native Plant and Animal Species. SDI Group. February 9, 2001, diakses 23/01/2018 pukul 17:10

dan hampir punah. Pelestarian ini dipantau oleh United States Fish and Wildlife Service. Terdapat lima puluh delapan taman nasional dan ratusan taman, hutan, dan padang gurun lainnya yang dikelola oleh pemerintah federal di Amerika Serikat. Secara keseluruhan, pemerintah pusat menguasai 28,8% dari luas keseluruhan negara. Sebagian besarnya adalah kawasan-kawasan yang dilindungi, namun beberapa di antaranya juga disewakan untuk kepentingan pengeboran minyak dan gas, pertambangan, perkayuan, atau peternakan, sedangkan 2,4% sisanya dimanfaatkan untuk kepentingan militer.

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Presiden yang dipilih setiap 4 tahun sekali dan dapat dipilih kembali dengan maksimal 2 kali periode. Presiden juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Nasional Amerika Serikat. Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 hingga saat ini, Amerika Serikat telah dipimpin oleh 45 Presiden.

Sedangkan sebagai negara yang berbentuk Federal, Amerika Serikat memiliki 50 Negara Bagian dan 1 wilayah Distrik. Setiap Negara Bagian dipimpin oleh Gubernur yang menjabat sebagai Kepala Negara Bagian dan Kepala Pemerintahan Negara Bagian.

Amerika Serikat tergolong sebagai negara dengan perekonomian termaju di dunia, beberapa merek-merek terkenal di dunia teknologi berasal dari negara yang memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar US\$ 18,56 triliun ini. Merek-merek tersebut diantaranya seperti Microsoft, Apple, Google, Amazon, Twitter, Facebook dan masih banyak lagi. Selain terdepan di produk-produk teknologi, telekomunikasi dan produk-produk elektronik, Amerika Serikat juga merupakan produsen pesawat terbang, minyak dan gas serta produk-produk agrikultur seperti kacang kedelai, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, gandum, produk susu dan daging. Pendapatan perkapita Amerika Serikat

berdasarkan Paritas Daya Beli (PPP) adalah sebesar US\$ 57.300,- dan menduduki urutan ke-18 tertinggi di dunia.

Di bidang Kemiliteran, Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara pemenang perang dunia kedua ini menjadi negara pertama yang mengembangkan senjata nuklir dan juga sebagai salah satu dari 5 negara yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir saat ini. Pengeluaran Militer Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia ini, yaitu sebesar US\$ 596,02 miliar pada tahun 2015.

Setelah selesainya Perang Dunia kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kedua-duanya merupakan negara adidaya pemenang perang dunia kedua ini saling berebut kekuasaan dan pengaruh di dunia yang pada saat itu dikenal dengan istilah Perang Dingin. Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet dan akhirnya perang dingin pada tahun 1990-an, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara Adidaya di Dunia.

Dalam Hubungan Luar Negeri, Amerika Serikat merupakan anggota PBB yang menjabat sebagai Dewan Keamanan PBB dan memiliki Hak Veto, yaitu Hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi di PBB. Amerika Serikat juga merupakan anggota dari lembaga-lembaga lainnya yang dibawah PBB serta anggota dari NATO, APEC, G7, G8, G20 dan OECD.²⁴

C. Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi

Dalam kebijakan luar negeri, Arab Saudi memilikitujuan menjaga keamanan dan posisi penting terhadap semenanjung Arab, membela kepentingan Islam, mempromosikan solidaritas antara pemerintah Islam dan memelihara hubungan kerjasama dengan produsen minyak lainnya dan konsumen minyak negara besar.

²⁴ <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-amerika-serikat-united-states-amerika/> diakses 18/01/18 pukul 20:25

Menurut Kementerian Luar Negeri, kebijakan luar negeri Arab Saudi difokuskan pada kerjasama dengan negara-negara Teluk, kesatuan dunia Arab, solidaritas dengan negara-negara Muslim dan dukungan untuk Perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Dalam praktek, perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir telah menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, konflik Israel-Palestina, Irak, ancaman yang dirasakan dari Iran, efek dari harga minyak, dan meningkatkan pengaruh di dunia Muslim dari Wahabi bentuk Islam melalui sumbangan luar negeri. Selain itu, hubungan dengan Barat dirasa sangat rumit karena negara Barat beranggapan Arab Saudi merupakan sumber terorisme Islam.

Arab Saudi bergabung dengan PBB pada tahun 1945 dan merupakan anggota pendiri dari Liga Arab, Dewan Kerjasama Teluk, Liga Dunia Muslim dan Organisasi Kerjasama Islam. Hal ini memainkan peran penting dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, pada tahun 2005 bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Seperti yang diumumkan pada KTT Liga Arab 2009, Arab Saudi bermaksud untuk berpartisipasi dalam Arab Uni Bea Cukai yang didirikan pada tahun 2015 dan Arab Pasar Umum yang akan didirikan pada tahun 2020.²⁵

Sebagai anggota pendiri OPEC, kebijakan harga minyak adalah umumnya untuk menstabilkan pasar minyak dunia dan mencoba untuk moderat pergerakan harga yang tajam. Jangka panjang arah kebijakan Arab Saudi telah mempertahankan pasar yang stabil dan jangka panjang untuk cadangan minyak yang luas sehingga tidak membahayakan ekonomi Barat. Ini dilihat sebagai melindungi nilai aset

²⁵ David Johnston, (September 9, 2003), *Two years later: 9/11 Tactics; Official Says Qaeda Recruited Saudi Hijackers to Strain Ties*, The New York Times.
<https://www.nytimes.com/2003/09/09/us/two-years-later-9-11-tactics-official-says-qaeda-recruited-saudi-hijackers.html>, diakses 10/01/18 pukul 19:30

keuangan negara serta memberikan dukungan politik dan militer untuk pemerintah Arab Saudi.

Pengecualian utama untuk ini terjadi selama krisis minyak tahun 1973 ketika Arab Saudi, dengan negara-negara minyak Arab lainnya, digunakan embargo pada pasokan minyak untuk menekan Amerika Serikat untuk berhenti mendukung Israel. Masjid Finsbury Park, London, dibangun dengan uang pemerintah Arab Saudi dari program bantuan luar negeri; markas Islam ekstrimis ulama Abu Hamza sampai 2003.

Arab Saudi adalah salah satu penyumbang terbesar bantuan pembangunan, baik dalam volume bantuan dan rasio volume bantuan untuk PDB. Seperti tahun 2006, negara ini telah menyumbangkan 49 milyar untuk bantuan dalam tiga dekade sebelumnya, tetapi secara eksklusif untuk umat Islam (kecuali satu sumbangan sebesar setara dengan 250.000). Bantuan ini telah memberikan kontribusi untuk penyebaran Islam semacam itu ditemukan di Arab Saudi (Wahhabi) daripada membina tradisi dari kelompok etnis yang menerima. Efeknya telah menjadi erosi budaya Islam daerah. Contoh efek acculturizing bantuan Arab Saudi dapat dilihat antara Minangkabau dan Aceh di Indonesia, serta diantara orang-orang di Maladewa.

Berkenaan dengan konflik Israel-Palestina, Arab Saudi percaya itu adalah “kewajiban Arab dan Islam” untuk mendukung perjuangan Palestina dan “telah mengeluarkan pernyataan mengutuk agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan melawan tempat-tempat suci”. Paling utama kebijakan Arab Saudi tentang masalah inisiatif perdamaian Arab, pertama kali diluncurkan oleh Raja Abdullah sebagai Pangeran Mahkota. Kemudian pada tahun 2002, pemerintah-pemerintah Arab Saudi menawarkan “hubungan normal dan keamanan Israel dalam pertukaran untuk penarikan mundur Israel penuh dari semua tanah yang diduduki oleh Arab Saudi, pengakuan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya dan kembalinya pengungsi Palestina”.

Arab Saudi telah lama dipandang sebagai yang paling pro-Barat dan sekutu dekat Amerika Serikat, khususnya di bawah Raja Fadh. Pada 1990-1991, Arab Saudi mendapat serangan dari Irak berikutnya invasi ke Kuwait, memainkan peran penting yang mendukung aksi militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Hubungan dengan negara-negara di dunia Arab yang menentang Perang Teluk menjadi sangat tegang. Demikian juga, kebijakan mendorong pengembangan internal dari suatu respon ekstrim Islam. Arab Saudi dibantu mengalahkan Irak dengan alih utang negara-negara dianggap lunas, khususnya Amerika Serikat, dalam bentuk tunai (misalnya, \$15 milyar untuk Amerika Serikat saja) dan dengan membeli sejumlah besar senjata dari perusahaan Amerika Serikat dan dengan mendukung pimpinan proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Hal ini juga diikuti Amerika Serikat dalam sikapnya terhadap Iran, yang dalam setiap peristiwa, dilihat sebagai mencoba untuk ekspor revolusi Islam ke negara-negara lain di kawasan dengan signifikan Syiah populasi, termasuk Arab Saudi.

Setelah Raja Fadh sakit pada tahun 1995, Abdullah, Putra Mahkota selanjutnya, menerima tanggung jawab untuk kebijakan luar negeri. Sebuah perubahan yang nyata pada hubungan Arab Saudi-Amerika Serikat terjadi, sebagai Abdullah berusaha untuk membuat jarak antara kebijakan dan pro-Barat. Abdullah mengambil garis yang lebih independen dari Amerika Serikat dan berkonsentrasi pada peningkatan hubungan regional, khususnya Iran. Beberapa sengketa perbatasan lama dapat diselesaikan, termasuk secara signifikan membentuk kembali perbatasan dengan Yaman. Dimana menghasilkan hubungan semakin tegang dengan Amerika Serikat.

Pada tahun 2003, kebijakan baru Abdullah tercermin dalam penolakan pemerintah Arab Saudi untuk mendukung atau untuk berpartisipasi dalam pimpinan invasi ke Irak. Beberapa kritikus Amerika Serikat melihat ini sebagai upaya oleh keluarga kerajaan untuk memenangkan radikal Islam kerajaan. Tahun yang sama Arab Saudi dan pejabat

pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk menarik semua pasukan militer Amerika Serikat dari tanah Saudi. Sejak naik tahta pada tahun 2005, Raja Abdullah telah mengikuti kebijakan yang lebih aktivis asing dan terus mendorong kembali kebijakan Amerika Serikat yang tidak populer di Arab Saudi (misalnya, menolak untuk memberikan bantuan materi untuk mendukung pemerintah Irak yang baru). Namun, semakin pilar dengan Amerika Serikat, ketakutan dan ketidakpercayaan Iran adalah menjadi faktor yang signifikan dalam kebijakan Saudi. Pada tahun 2010, sebuah situs mengungkapkan dokumen rahasia bahwa Raja Abdullah mendesak Amerika Serikat untuk menyerang Iran dalam rangka untuk perluasan area.

Hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya menjadi tegang karena suatu persepsi bahwa Arab Saudi telah menjadi sumber aktifitas teroris Islam, bukan hanya internal, tetapi juga seluruh dunia. Osama bin Laden pada serangan 11 September adalah peristiwa dimana warga negara Saudi, sebagai Wahhabisme merupakan tempat dimana Al-Qaeda dan Organisasi teroris berkembang. Persepsi Amerika Serikat terhadap Arab Saudi meletakkan dasar bagi pertumbuhan kelompok-kelompok militan seperti Al-Qaeda dan bahwa setelah serangan itu dilakukan sedikit demi sedikit untuk membantu melacak para militan atau mencegah kekejaman di masa depan.

Setelah gelombang protes dan awal 2011 revolusi mempengaruhi dunia Arab, Arab Saudi menawarkan suaka untuk menggulingkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali dari Tunisia dan Raja Abdullah menelepon Presiden Hosni Mubarak dari Mesir (sebelum deposisinya) untuk menawarkan dukungannya.

Ketika Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud dari Arab Saudi mengambil alih singgasana dari saudara tirinya Fadh sekitar lima tahun yang silam, banyak pengamat politik internasional dan juga pemerintah Amerika Serikat bersikap skeptis. Saat itu Abdullah dinilai lebih berorientasi konservatif dalam hal keagamaan, lebih bersikap pan-arabisme dan tidak

begitu pro-Amerika Serikat ketimbang saudara tirinya yang selama 23 tahun pemerintahannya selalu membela hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat.

Sudah sejak tahun 1990-an para pengkritik Abdullah khawatir bahwa ia akan menukar aliansinya dengan Amerika Serikat dengan peningkatan kemitraan dengan negara-negara tetangga Arab Saudi, misalnya Nesir dan Suriah. Pada skenario lainnya kerap didiskusikan kemungkinan kebijakan politik Abdullah yang lebih agresif dalam kaitan dengan proses perdamaian di Timur Tengah serta pendekatan substansial terhadap Iran.

Pendukung-pendukung ini selalu mengingatkan bahwa bulan Agustus 1990, saat Irak menduduki Kuwait, Abdullah mengatakan dengan gencarnya menentang keputusan Raja Fadh untuk meminta bantuan pasukan Amerika Serikat. Walaupun kekhawatiran terburuk dari para perancang strategi di Washington saat itu ternyata tidak terwujud, Arab Saudi di bawah Abdullah memang mengambil jarak dari Amerika Serikat dan menjalankan kebijakan politik regional yang lebih aktif ketimbang sebelumnya. Kenyataan ini berulang kali menimbulkan ketegangan hubungan dengan pihak Amerika Serikat. Di sisi lain perkembangan ini ironisnya lebih banyak dipicu oleh kekecewaan Arab Saudi ketimbang oleh pandangan pribadi dan keyakinan politik luar negeri Arab Saudi. Arab Saudi merasa bahwa adanya penurunan terhadap kebijakan politik Amerika Serikat di wilayah itu.

Gerakan politik Islam di Arab Saudi yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat dalam kerajaan dengan para ulama tentang rencana Amerika Serikat untuk menyerang Afghanistan pasca tragedi 11 September menjadi permasalahan baru di negara tempat lahirnya Agama Islam itu. Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz, saudara tiri raja, menentang keras pemberian izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer Arab Saudi untuk menyerang negara-negara Arab atau Muslim. Ketegangan yang terjadi sejatinya datang akibat fatwa dari Mufti besar Abdul Aziz bin Abdullah yang

mengharamkan digunakannya pangkalan-pangkalan militer negerinya untuk operasi militer Amerika Serikat ke Afghanistan atau negara manapun termasuk Taliban.²⁶

Selain dihambat oleh faktor di atas, Arab Saudi juga dipusingkan dengan kondisi sosial ekonomi yang semakin menggoyahkan posisi keluarga kerajaan. Kekecewaan rakyat terhadap pemerintah akan memudahkan lawan politik keluarga monarki untuk merekrut simpatisan. Akan tetapi, tidak hanya kelompok oposisi garis keras Al-Qaeda maupun Wahabi Fundamentalists yang mungkin bermain dibalik teror tetapi juga golongan lain yang tidak menyenangkan kerajaan.

Kerabat kerajaan oleh pemberontak dianggap amat pro-Amerika Serikat. Hubungan harmonis Arab Saudi dengan Amerika Serikat mendasari lahirnya gerakan anti Amerika Serikat yang dijuluki sebagai gerakan Islam fundamental atau Islam Radikal. Bahkan sepanjang periode 1990-an terjadi aksi-aksi teror bom di dalam negeri Arab Saudi yang disebabkan arah politik Raja Fadh yang dianggap oleh kelompok oposisi tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam serta dalam kurun waktu yang bersamaan terus terbatasnya jalur politik bagi kelompok-kelompok oposisi. Aksi teror ini kian merebak semenjak adanya upaya kerajaan Arab Saudi untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.²⁷

Pihak kerajaan enggan berkonfrontasi dengan gerakan garis keras karena sebagian legitimasi keluarga kerajaan itu bersumber dari kedekatan keluarga dengan filsafat Wahabi. Bisa dikatakan bahwa terbentuknya negara Arab Saudi berkat koalisi kuat keturunan Saudiah dan Wahabiah. Akan tetapi belakangan terjadi pergeseran disebabkan kekecewaan kelompok Wahabiah, akibat kedekatan Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, dewasa ini pemerintah Arab

²⁶ Qurais Sulaiman Aljabry, "Politik Luar Negeri Arab Saudi Terhadap Amerika Serikat Pasca Tragedi World Trade Center (11 September 2001-1 Agustus 2005)", Jakarta: Universitas Paramadina, 2007

²⁷ Robert Lacey, *Kerajaan Petro Dolar Saudi Arabia*, Jakarta: Dunia Pustaka, 1986

Saudi mulai mendukung gerakan-gerakan Islam Liberal dalam negeri yang menginginkan berlakunya demokrasi.²⁸

D. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Arab Saudi

Amerika Serikat mulai memberikan perhatian cukup serius terhadap kawasan Timur Tengah khususnya Arab Saudi, seiring dengan beroperasinya berbagai perusahaan tambang minyak Amerika Serikat di kawasan itu. Hal ini antara lain bermula pada tahun 1932-1934 ketika ditemukan sumber minyak di Bahrain, Arab Saudi dan Kuwait. Kemudian Amerika Serikat mulai mengembangkan sayapnya di kawasan penghasil minyak tersebut. Amerika Serikat kemudian berhasil mendapatkan konsesi untuk ikut memanfaatkan hasil bumi itu. Sejak 29 Mei 1933, "Standard Oil Company" dari California mendapatkan hak eksplorasi minyak selama 60 tahun meliputi daerah yang luas di Arab Saudi bagian Timur.

California Arabian Standard Oil didirikan sebagai perusahaan penambang minyak. Pada saat perusahaan minyak Texas bergabung dengan perusahaan itu pada tahun 1934, nama perusahaan itu diubah menjadi Arabian Oil Company (Aramco). Salah satu langkah permulaan bagi para pemegang konsesi ialah harus memberikan pinjaman 30.000 pounsterling dalam bentuk emas kepada pemerintah Arab Saudi yang sedang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh depresi dunia.

Perusahaan Amerika Serikat melakukan hal itu atas resiko sendiri menangani masalah keuangan yang begitu besar karena memang pada saat Amerika Serikat dengan Arab Saudi, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan perhatian untuk mendukung beroperasinya perusahaan itu. Namun, pinjaman itu menghasilkan deviden yang prospektif berupa itikad baik dan kemudian terbukti bahwa secara ekonomi dapat dibenarkan. Semenjak saat itu dilanjutkan pada masa presiden Roosevelt, Amerika Serikat mulai melakukan

²⁸ *Ibid.*

kegiatan intervensinya yang dikemas dalam bentuk politik luar negeri. Semua itu dilakukan dalam rangka memperkokoh hegemoninya di kawasan yang memiliki penduduk mayoritas Muslim tersebut. Perlu diketahui, Roosevelt berpandangan bahwa kawasan Timur Tengah adalah kawasan penghasil minyak raksasa di dunia.

Pada tahun 1944, Roosevelt mengadakan negosiasi bersama duta besar Inggris, untuk saling menggunakan minyak bumi Timur Tengah. “Minyak Kawasan Persia adalah milik kalian. Kita bagi bersama minyak Irak dan Kuwait. Sedangkan mengenai Saudi Arabia, maka minyaknya adalah milik kita bersama”, tegas Roosevelt. Sehingga pada tanggal 8 Agustus 1944, ditandatangani perjanjian Inggris-Amerika, untuk saling memanfaatkan hasil minyak bumi Timur Tengah. Pada tahun 1945, Amerika Serikat mulai membangun pangkalan militer di Dahrn. Pasca Perang Dunia II (1945), Amerika Serikat mengambil alih posisi Inggris sebagai Super Power.²⁹

Keberadaan Israel terlihat sangat jelas merupakan bagian dari strategi Barat untuk mendominasi Timur Tengah. Berdirinya negara Israel (1948), sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya Israel, Amerika Serikat lebih leluasa mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik beberapa negara di Timur Tengah. Tidak aneh kalau Amerika Serikat sangat matimatian membela keberadaan Israel. Berulang-ulang masalah ini diungkap oleh pejabat Amerika Serikat dari masa ke masa, tidak peduli presidennya.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Collin Powel di depan komite anggaran senat (5/3/2001), “Israel adalah sahabat dan sekutu yang kuat bagi bangsa Amerika dan pemerintahan Amerika Serikat; menjamin keamanan Israel adalah prioritas utama; akan tetap seperti itu bagi pemerintahan yang sekarang”. Collin Powel mengulangi dukungan abadi Amerika Serikat kepada Israel

²⁹ Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*, Yogyakarta: Publishing House, 2014, hlm. 135-137

saat berpidato di depan komite kerjasama Amerika Serikat-Israel untuk urusan umum (AIPAC) pada tanggal 8 Maret 2001 di Washington, “Sungguh, kami telah berada di pihak Israel sejak berdirinya dan kami akan selalu bersama Israel dalam sepanjang sejarahnya”.

Sejak dahulu kebijakan Amerika Serikat sudah merupakan kebijakan hidup-mati dan tidak bisa ditawar lagi adalah suplai minyak dari Timur Tengah agar tetap ke tangan Amerika Serikat. Pada tahun 1953, Dewan Keamanan Nasional mengatakan, “Kebijakan Amerika Serikat adalah mempertahankan sumber minyak di Timur Tengah agar tetap berada di tangan Amerika”.³⁰

Peristiwa WTC (11 September 2001) telah membangkitkan kesadaran Amerika Serikat bahwa satu-satunya kekuatan di dunia di era Pasca Perang Dingin ini yang sanggup mengimbangi Amerika Serikat adalah kekuatan politik Islam. Kekhawatiran ini berulang-ulang disampaikan cendekiawan Amerika Serikat seperti Huntington maupun para politisi Amerika Serikat Henry Kissinger. Oleh karena itu Amerika Serikat kemudian banyak melakukan tindakan menekan dan memberangus potensi kekuatan politik Islam. Misalnya, Amerika Serikat menyerang Afghanistan, pasca runtuhnya gedung kembar WTC (11/9/2001). Penyerangan yang dilakukan dengan galih menumbangkan kekuatan terorisme. Gerakan Al-Qaeda dijadikan sebagai sasaran, disambung dengan perombakan pemerintahan Afghanistan dari Taliban kepada pemerintahan Karzei yang pro-Amerika Serikat.

Tidak aneh jika Amerika Serikat menolak mentah-mentah pendirian pemerintahan Islam pasca invasi Amerika Serikat di Irak. Amerika Serikat tentu saja tidak peduli meskipun hal itu dituntut oleh masyarakat Irak. Keberadaan pemerintahan Islam akan memperkuat pengaruh politik Islam yang memang memiliki ciri utama menentang penjajahan

³⁰ Mohammad Haekal, *Cutting The Lions Tail; Suez Through Egyptian Eyes*, 1986, hlm. 38

terhadap kaum Muslim. Meskipun Amerika Serikat telah menyponsori terbentuknya pemerintahan yang demokrasi di Irak atau di negara Muslim yang lainnya, namun Amerika Serikat tetap akan menekan gerakan Islam melalui rezim-rezim bonekanya.

Menyegarkan rezim-rezim lama dengan membentuk rezim baru yang lebih pro-Amerika Serikat adalah kebijakan lainnya yang dilakukan Amerika Serikat di era Pasca Perang Dingin. Isu yang diangkat adalah senjata pemusnah massal, mendukung terorisme (khususnya Al-Qaeda), demokratisasi, rezim diktator atau mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat.

Saddam Hussain adalah salah satu kasusnya. Banyak pihak yang tahu bahwa Amerika Serikat lah yang memperkuat rezim Saddam Hussain dengan dana dan bantuan militer saat perang melawan Iran. Namun, Saddam Hussain perlu disegarkan dengan rezim baru yang lebih pro-Amerika Serikat. Ini juga untuk menghilangkan kesan bahwa Amerika Serikat terus-menerus mendukung rezim diktator. Apalagi Amerika Serikat melihat rezim di Irak akan lebih memaksimalkan pemanfaatan minyak Irak bagi kepentingan Amerika Serikat. Penyegaran rezim ini kemungkinan besar akan dilakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain seperti Iran dan Suriah.

Mengopinikan demokratisasi Timur Tengah juga merupakan kebijakan umum politik luar negeri Amerika Serikat. Demokratisasi adalah nilai yang sering dijadikan alat penajahan oleh Amerika Serikat terhadap lawan politiknya. Alasan demokratisasi akan selalu dijadikan sebagai alasan untuk bertindak (*Reason why*) oleh Amerika Serikat untuk mengganti rezim-rezim Arab yang diktator (tidak peduli meskipun sebelumnya rezim ini didukung oleh Amerika Serikat).

Dengan alasan ini, Amerika Serikat senantiasa bisa mengancam pergantian rezim di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Suriah, Iran dan sekitarnya.